

# PARIWISATA; ANTARA TUNTUTAN INDUSTRI DAN KEARIFAN LOKAL

Abuya Busro Karim

(Penulis, Bupati Sumenep periode 2010-2015. e-mail: busyrokarim@yahoo.com)

## **Abstract**

*This simple article reflects the condition of tourism in Madura, particularly in Sumenep region. The fact describes that it has not been easy to develop tourism place as it demonstrates in Bali. Tourism development must be natural (sunnatullah), however it finds any handicaps that needs wise response. Madurese tourism development must consider the following: Islam as the major religion of Madurese and the human resource. Hence, tourism must protect the local people become the victim of tourism industry. A good tourism industry is not only economic oriented but also it must give substantial challenge to Islamic and Madurese culture to take role in tourism industry.*

## **Kata-kata kunci**

*pariwisata, budaya, Madura, Sumenep*

## **Pendahuluan**

Dunia pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara, di samping sektor migas. Sebagai sumber pendapatan, maka sudah selayaknya sektor pariwisata mendapat perhatian lebih intensif atau paling tidak sejajar dengan sektor-sektor lain, apalagi penggalan dari sektor ini belum dimaksimalkan.

Dengan mengembangkan potensi wisata di Sumenep, tidak tertutup kemungkinan sektor ini akan menjadi sumber pendapatan PAD Sumenep. Menurut Usman<sup>1</sup> dari sudut pandang sosiologis kegiatan pariwisata setidaknya

nya mencakup tiga dimensi interaksi, yaitu dimensi kultural, politik dan bisnis. Dalam dimensi kultural, kegiatan pariwisata menjadi ajang akulturasi budaya berbagai etnis dan bangsa. Dimensi politik melahirkan dua kemungkinan yang berbeda, yaitu menimbulkan persahabatan antaretnis dan antarbangsa atau menimbulkan bentuk-bentuk penindasan, eksploitasi dan neokolonialisme. Sedangkan dalam dimensi bisnis memungkinkan terjadinya pertemuan unit-unit usaha. Bentuk-bentuk yang disajikan oleh unit-unit usaha ini dapat berupa barang atau jasa, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

---

<sup>1</sup>Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003).

Disadari atau tidak, Indonesia khususnya di Madura memiliki potensi pariwisata yang cukup melimpah. Tuhan telah menganugerahkan negara kita menjadi negara yang elok dan mampu menarik perhatian, tidak hanya masyarakat dalam negeri, tetapi telah mampu menebar pesona ke negara-negara lain di belahan dunia. Keelokan Indonesia semakin sempurna berkat letaknya yang cukup strategis, sehingga memungkinkan turis asing dengan mudah bisa menikmati keelokan alam Indonesia yang masih perawan. Sumenep memiliki potensi wisata alam yang cukup membanggakan, terutama sepanjang pantai utara. Salah satu yang paling dikenal adalah Lombang dan Slopeng, di samping juga potensi wisata lainnya, seperti Museum Kraton Sumenep, Makam Raja-Raja di Asta Tinggi dan Masjid Jamik Sumenep, kerapian sapi, *sapi sonok*, dan kesenian saronen. Kekayaan alam dan kekayaan budaya menyatu menciptakan satu muzaik yang sangat indah. Sebuah panorama yang sepatutnya disyukuri dan dikembangkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakatnya. Potensi wisata tidak hanya berbentuk wisata alam, tetapi juga wisata budaya yang menjadi salah satu kekayaan tak terhingga bangsa kita.

Kondisi pariwisata di Madura tidak bisa dilihat secara parsial. Ia harus dilihat secara integral dengan faktor-faktor lain. Dengan kata lain, pertumbuhan dunia pariwisata Indonesia tidak hanya bisa dilihat dari hal-hal yang berhubungan langsung dengan dunia tersebut, tetapi juga dengan faktor-faktor penting lain seperti kondisi penerimaan masyarakat lokal, keamanan, wilayah dan ekonomi

masyarakat, termasuk krisis moneter yang menimpa Asia Tenggara yang pasti berimbas pada perkembangan pariwisata di kawasan Sumenep. Salah satu kendala pariwisata di Sumenep adalah letak wilayah ini yang cukup jauh dari Surabaya. Namun keamanan, potensi konflik yang sangat kecil, dan keramahan masyarakat terhadap wisatawan merupakan faktor yang mendukung pengembangan pariwisata di Sumenep dan Madura pada umumnya.

Upaya meningkatkan dunia pariwisata di Sumenep secara teknis bisa dilakukan oleh dinas terkait (dalam hal ini dinas pariwisata), tetapi perlu juga melibatkan swasta profesional. Dukungan pihak swasta terhadap peningkatan pariwisata harus digali, mengingat infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan sangat besar dan luas, seperti perhotelan, penunjang transportasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan swasta dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Hingga saat ini, di Madura masih belum ada lembaga khusus yang mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan pariwisata. Tetapi bukan berarti peran swasta sama sekali tidak ada, sekalipun masih belum diorganisir dan diarahkan. Misalnya industri perhotelan yang menjamur di Madura tidak diarahkan untuk menunjang industri pariwisata Madura.

Begitu juga sektor lain, seperti sektor pendidikan, dan kebudayaan. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa program pariwisata masih dilaksanakan secara setengah hati. Tidak ada upaya optimal dari institusi

terkait untuk meningkatkan potensi pariwisata yang dimiliki.

Sebenarnya, dalam perjalanan pariwisata di Indonesia beberapa kali diupayakan terbentuknya wadah yang melibatkan swasta dalam pariwisata, namun berbenturan dengan ketidaksiapan para birokrat dan dominasi oleh kalangan birokrat sehingga swasta sama sekali tidak ikut berpartisipasi.<sup>2</sup> Gurita birokrasi lagi-lagi menjadi batu sandungan bagi perkembangan dunia pariwisata. Masalahnya sekarang, relakah pemerintah dan jajaran birokrasinya mengikutsertakan swasta dalam menyukseskan program ini?

Agenda penting yang berhubungan dengan pengikutsertaan swasta dalam pelaksanaan program pariwisata adalah menyusun *draft* model kerja sama yang akan dibangun, karena kesalahan orientasi dan format kerjasama akan sangat berpengaruh terhadap masa depan pariwisata di Madura. Peran swasta memang sangat penting, tetapi pemberian wewenang yang tidak terbatas justru akan merugikan negara dan masyarakat. Dengan demikian format yang harus dibangun adalah memanfaatkan swasta sebagai penunjang industri dengan tetap di bawah naungan dan tanggung jawab pemerintah, dengan harapan pemerintah akan memiliki kekuatan untuk menentukan arah dan laju industri pariwisata yang bebas dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Salah satu masalah yang menyebabkan mandegnya industri pariwisata adalah rendahnya standar kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang pariwisata di Madura. Oleh sebab itu, profesionalisme pariwisata di tingkat lokal sangat diperlukan untuk menghadapi kompetensi global. Memasuki era pasar bebas, standar global menjadi semakin urgen. Tingkat sumber daya di bidang pariwisata harus semakin ditingkatkan, paling tidak sebanding atau tidak jauh tertinggal dari daerah lain, seperti Malang misalnya. Tidak adanya peningkatan kualitas pelaksana program ini akan menghambat laju perkembangan dunia pariwisata, bahkan lebih ekstrim lagi bisa memandulkan industri pariwisata di Madura.

Modal anugerah alam yang luar biasa tidak akan banyak artinya tanpa ditopang oleh SDM yang memadai. Alam Madura tidak akan dikenal oleh turis asing tanpa adanya promosi yang terarah dan profesional. Begitu juga peran pemandu wisata profesional, tersedianya infrastruktur dan suprastruktur pendukung, serta tingkat pelayanan akan menjadi kunci efektif tidaknya industri pariwisata yang kita laksanakan.

Dalam hal ini maka kerja sama antara pihak pemerintah dengan lembaga swasta profesional harus mampu merumuskan standar kompetensi yang dibutuhkan dan itu harus mengacu pada perkembangan dunia pariwisata di dunia. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan bisa berkembang dengan pesat dan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional yang sedang lesu. Di sinilah pentingnya seorang pengelola yang visioner. Tanpa adanya pengelola yang memiliki visi yang kuat serta didukung oleh semua elemen, termasuk juga pengusaha dan

---

<sup>2</sup>Peningkatan Daya Saing Pariwisata Harus Jadi Fokus Pemerintah Baru, Kompas, 25 September 2004.

masyarakat, maka pengembangan pariwisata akan berjalan di tempat.

Setidaknya ada tiga agenda yang harus dilakukan secara sempurna untuk mengembangkan dunia pariwisata Madura. *Pertama*, mengadakan kajian secara komprehensif *plus-minus* pengembangan pariwisata, baik dari aspek budaya, ekonomi, sosial, maupun moral. Aspek budaya yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah masuknya budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, khususnya Madura yang islami. Kekhawatiran lain dengan masuknya wisatawan domestik dan manca negara adalah krisis budaya lokal sehingga nilai-nilai budaya Madura akan terkikis. Aspek ekonomi, secara kasat mata akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat, minimal di sekitar wisata, produk lokal semakin meningkat dan akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam aspek moral, masyarakat sering mengasumsikan bahwa pariwisata cenderung negatif. Asumsi ini sah-sah saja, mungkin mereka membayangkan dampak pariwisata seperti di Bali, di mana turis dari aspek busana saja sangat tidak islami dan efek lainnya seperti prostitusi.

Dalam konteks ini, perlu kajian serius bagaimana mencari upaya agar pengembangan wisata tidak seperti Bali. Justru tantangan kita bagaimana nilai-nilai Islam masuk dunia wisata atau dengan kata lain *wisata islami*, mungkin salah satunya adalah setiap wisatawan yang berkunjung ke Sumenep harus berbusana sopan, tidak boleh mabuk-mabukan dan perilaku lain yang keluar dari nilai-nilai Islam. Lalu siapa yang mengawasi ini? Tak lain adalah masyarakat (NGO, Ormas,

ulama) dan instansi atau lembaga terkait (MUI, kepolisian, Dinas Pariwisata, DPRD, dan sebagainya).

*Kedua*, kajian potensi pasar. Pertanyaan sederhananya adalah kira-kira bagaimana potensi pasar dengan program wisata. Kajian potensi pasar pada dasarnya adalah untuk mengetahui jenis pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan pariwisata yang dibutuhkan secara umum tersedia, seperti produk unggulan di tingkat lokal. Tanpa adanya riset pasar yang realistis, ada kemungkinan industri pariwisata yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan.

Prinsipnya adalah bahwa industri pariwisata sama dengan memproduksi barang atau jasa lainnya. Butuh kreasi baru untuk memberikan sesuatu yang terbaik demi memuaskan para konsumen. Selama ini kegiatan pariwisata cenderung alamiah, tanpa dipoles oleh sentuhan kreatif untuk menghasilkan sebuah produk yang memberikan kepuasan kepada konsumennya.

Hasil kajian juga dapat dijadikan acuan untuk membuat program *ketiga*, yaitu promosi. Sebagaimana industri-industri lain, kegiatan promosi merupakan bagian yang integral. Berhasil-tidaknya sebuah industri akan sangat ditentukan oleh kegiatan promosi dan marketingnya.

Sampai saat ini kegiatan promosi yang dilakukan untuk mengenalkan industri pariwisata belum memadai, terbukti potensi pariwisata di Madura belum dikenal di kota-kota di Indonesia apalagi di mancanegara. Kondisi ini diperparah dengan ketidakmampuan duta pariwisata Madura untuk meyakinkan masyarakat

luas bahwa di Madura terdapat beberapa tempat wisata alami yang tidak dimiliki semua daerah di Indonesia. Demikian juga duta wisata belum mampu meyakinkan masyarakat luar Madura bahwa wilayah ini mempunyai produk-produk yang khas.

### **Mengembangkan Kebudayaan**

Budaya merupakan pancaran dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang berkembang dalam sebuah komunitas. Sebagai sistem nilai dan sistem kepercayaan, budaya tidak bisa dilepaskan dari unsur spiritual masyarakatnya.

Dia adalah cerminan pengalaman transenden yang kemudian tercermin dalam tindakan, material, dan *style* serta pola hidup masyarakat. Dari situlah, maka budaya akan eksis dan menyebar untuk menyatakan eksistensinya.

Pariwisata merupakan '*tempat*' yang nyaman untuk menyatakan eksistensinya, tempat yang memungkinkannya untuk berkembang dan menyebar. Pariwisata menjadi salah satu media untuk mengenalkan unsur budaya yang dimiliki oleh sebuah entitas kepada khalayak di luar komunitasnya. Tetapi di sisi lain, unsur budaya merupakan komoditas potensial yang bisa menarik devisa luar biasa.

Pariwisata yang diintegrasikan dengan kekayaan budaya memiliki efek yang sangat kuat. Budaya merupakan unsur transenden, sebagai ruh, dan eksistensi dari kegiatan pariwisata sehingga ke depan pariwisata mampu mengembangkan bentuk kegiatan wisata yang adil antara beberapa komunitas yang berbeda;

tujuannya untuk saling pengertian, solidaritas.<sup>3</sup>

Berbicara dalam lingkup Madura, khususnya Sumenep, dari sisi potensi alam pada dasarnya tidak kalah dengan Bali, terutama wisata laut. Misalnya di pantai Lombang dengan cemara udangnya yang konon hanya ada 2 di dunia, yaitu di Jepang dan Lombang. Pantai Slopeng sangat layak dijadikan wisata bahari. Demikian juga kawasan pantai utara lainnya yang memiliki kekhasan tersendiri dengan pantai yang lebar, pasir dan laut yang bersih. Beberapa pulau kecil di kawasan timur Sumenep juga menyimpan pesona tersendiri. Tetapi pariwisata apa pun bentuknya tidak berdiri sendiri hanya karena dukungan alam. Itu harus didukung oleh kultur budaya masyarakat setempat. Yang menjadi persoalan kemudian, bagaimana kita mendudukkan pariwisata berdampingan dengan budaya masyarakat atau, kalau mungkin, mengintegrasikannya?

Maka yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan pariwisata secara alami. Yang dimaksud alami adalah membiarkan wisata itu berkembang sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Artinya posisi pemerintah hanya sebatas fasilitator, memberikan saran dan mendorong industri pariwisata untuk maju. Itu pun semua tergantung respon positif dari masyarakat setempat dan mendapatkan perhatian banyak kalangan yang kompeten dengan pariwisata ini, sehingga dengan sendirinya akan memudahkan pemerintah untuk memberikan sentuhan-sentuhan baru.

---

<sup>3</sup>Kohdiyati, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1996)

Jadi, pariwisata tidak bisa digarap begitu saja dengan menggunakan tangan-tangan terampil tanpa didukung oleh berbagai hal. Maka biarkan saja seolah-olah alami, mungkin bisa dipromosikan secara bertahap, misalnya even-even tertentu diadakan di daerah tersebut sehingga sekaligus bisa dipromosikan.

Budaya pariwisata harus didukung oleh kultur masyarakat, juga sarana, terutama transportasi. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang memiliki jaringan transportasi yang sudah bagus, misalnya Lapangan Udara dan bisa dijangkau dengan pesawat terbang dan semacamnya. Tetapi untuk kasus Sumenep, orang mau rekreasi harus menempuh jarak yang cukup jauh. Tentu saja ini menjadi masalah tersendiri dan salah satu alasan kenapa Sumenep tidak pernah dilirik termasuk juga oleh kalangan investor, karena dianggap tidak menguntungkan.

Melihat perkembangan pariwisata secara umum di tanah air, maka mengintegrasikan unsur kebudayaan dalam promosi wisata menjadi sangat penting. Indonesia khususnya Madura memiliki keelokan alam sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, tetapi Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya sebagai hasil cipta karya dan karsa masyarakatnya yang plural. Sebuah kombinasi yang akan menjadi magnet tersendiri bagi dunia pariwisata nusantara.

### **Melibatkan Masyarakat**

Program pariwisata tidak hanya dijalankan atas pertimbangan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan rakyat. Program pembangunan apa pun—termasuk industri pariwisata—dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana

diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Kesejahteraan merupakan esensi dari tujuan pembangunan. Pendapatan, insentif, dan pertumbuhan ekonomi diupayakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan itu.

Melihat bahwa yang menjadi target utama adalah rakyat, maka mereka harus dilibatkan. Masyarakat bukan objek yang statis, tetapi dia sekaligus subjek dinamis yang juga ikut andil dalam menjaga keberadaannya. Di samping itu, pariwisata juga diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam konservasi budaya sebagai unsur penting dari pariwisata. Masyarakat merupakan induk yang melahirkan budaya, dan masyarakatlah yang akan menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya tersebut, salah satunya melalui program pariwisata.

Keterlibatan masyarakat akan melahirkan hubungan yang sinergis antara masyarakat di satu sisi dan dunia pariwisata di sisi yang lain. Pola hubungan simbiosis ini akan mampu membawa kejayaan dunia pariwisata dan masyarakat sekaligus. Keduanya merupakan tujuan strategis yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Konsep untuk membangun keseimbangan relasi tersebut secara sederhana bisa disebut sebagai *pariwisata berbasis masyarakat*, yaitu pariwisata yang menuntut keterlibatan masyarakat secara langsung dan sengaja didesain untuk memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraannya.<sup>4</sup>

Masyarakat di satu sisi bisa dijadikan sebagai pasar potensial

---

<sup>4</sup>*Pariwisata Berbasis Masyarakat Perlu Dikembangkan*, Kompas, 14 Juni 2003.

produk industri pariwisata yang memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi di sisi lain juga bisa dijadikan sebagai produsen penyuplai produk pariwisata, baik produk primer maupun produk sekunder atau bahkan produk substitusi. Masyarakat memiliki potensi yang luar biasa dalam hal ini, tetapi jarang dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat cenderung hanya menjadi penonton dan termarginalkan, tanpa mampu berbuat banyak. Karakter masyarakat yang pasif ini menuntut para pengambil kebijakan—termasuk dalam bidang pariwisata— untuk memberikan kreasi dan sentuhan baru agar masyarakat lebih aktif menyikapi setiap peluang yang ada. Pola konsumtif terhadap produk luar (termasuk produk budaya) menjadikannya sebagai sebuah entitas yang tidak memiliki jati diri dan semakin tidak mampu mempertegas eksistensinya. Produk budaya yang dimiliki, serta prospek-prospek lain yang mungkin ditangkap sebagai sebuah potensi tidak dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akibat lanjutnya, masyarakat akan tetap menjadi objek marginal yang tidak produktif.

Sudah sewajarnya pemerintah, dalam hal ini pemegang kebijakan pengembangan pariwisata di tanah air, memberikan sentuhan baru kepada masyarakat sebagai salah satu upaya melibatkan mereka dalam mengembangkan industri pariwisata. Pengembangan industri pariwisata yang berbasis masyarakat akan memiliki keuntungan ganda. Martabat dan kesejahteraan akan semakin terangkat, pengelola industri pariwisata juga sangat diuntungkan dengan sumber daya potensial yang

dimiliki dengan biaya murah dan melimpah, tergantung sejauh mana kemauan politik penguasa untuk membina dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkreasi dan ikut serta dalam pengembangan industri ini.

Kesinambungan upaya tersebut akan melahirkan pola hubungan yang sehat antara banyak elemen, yang semuanya memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sederajat. Pemerintah, masyarakat, investor dan pihak swasta profesional berhak untuk mendapatkan keuntungan dari produk pariwisata yang diciptakan, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga dan mengembangkan produk-produk tersebut, sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang besar tanpa harus meninggalkan akar tunjangnya yang tertanam sebagai satu kesatuan yang utuh dengan komunitasnya.

### **Menimbang Kearifan Lokal**

Membangun pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi upaya tersebut bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Butuh pendekatan dan proses yang sangat panjang, serta perlu ada komunikasi yang intensif dan melibatkan emosi yang mendalam.

Setiap komunitas memiliki pola pandang sendiri yang unik, yang berbeda satu sama lain. Memahami pola pandang, sistem nilai dan kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat harus dilakukan pertama kali sebagai syarat mutlak untuk membangun kesepahaman dengan masyarakat yang bersangkutan.

Peran masyarakat untuk mengembangkan pariwisata juga ada tetapi tidak terlalu besar. Sebagian bahkan cenderung menolak. Lihat misalnya pada Hari Raya Ketupat. Seperti diketahui, hari raya tersebut boleh dikatakan merupakan hari pariwisata di Lembang, yang diramaikan dengan orkes dangdung dan sejenisnya. Namun pada hari yang sama sebagian masyarakat mengadakan acara *istighasah*. Itu merupakan penulakan halus terhadap acara pariwisata di Lembang.

Untuk sementara saya kira perlu ada sosialisasi jangka panjang. Ketika kita memasyarakatkan pariwisata, beberapa pihak selalu berpikir negatif. Karena yang terbayang di hadapan mereka adalah anak-anak mereka takut kehilangan identitas sebagai muslim yang baik. Itu nampaknya yang sulit untuk diselesaikan. Banyak orang bilang, Bali dari sisi budaya bagus, malah berkembang dengan baik, tetapi anak muda di sana dari segi akhlak sudah begitu hancur menurut asumsi sementara orang. Ini yang merasuk pandangan banyak orang. Sementara, masyarakat Lembang adalah santri yang berasal dari berbagai pondok-pondok pesantren. Jadi, untuk sementara membangun pariwisata berbasis masyarakat tampaknya masih sulit dilaksanakan di Sumenep.

Dikaji dalam perspektif sosiologis, dasar penolakan tersebut sudah melibatkan emosi masyarakat. Masyarakat cenderung menolak unsur eksternal ketika ia dianggap bertentangan dengan sistem nilai atau pola pandang yang mereka anut. Karena, pada dasarnya pola pandang dan sistem nilai tersebut merupakan ajaran yang menjadi pijakan masyarakat bersangkutan. Sebagai sistem nilai dan pola pandang, maka konsep tersebut tidak hanya bersifat

material, tetapi ada unsur kekuatan metafisik yang tersembunyi dan memiliki pertalian erat dengan emosi masyarakatnya. Kesalahan membaca masalah yang cukup peka ini akan menyulitkan komunikasi yang hendak dibangun. Maka, industri pariwisata di Sumenep hendaklah dibangun dengan memperhatikan sistem nilai dan sistem norma masyarakat Sumenep sendiri.

Pendekatan itulah yang bisa digunakan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap upaya pemerintah mengembangkan industri pariwisata. Penerimaan masyarakat merupakan sesuatu yang penting, terutama ketika mau mengundang investor untuk menanam investasi di bidang pariwisata. Pengalaman ini didapat ketika bupati dan dinas terkait di Sumenep menawarkan pulau-pulau kecil, menawarkan keindahan alam. Pertanyaan yang pertama muncul adalah bagaimana keamanan bagi investasi mereka. "Apakah masyarakat menerima kedatangan kami atau tidak?" Apakah pemerintah bertanggung jawab untuk itu semua. Kita sudah sering melakukan sosialisai di tingkat nasional, tetapi selalu muncul pertanyaan seperti itu. Kita sudah sering menawarkan Kangan untuk membangun pariwisata, kita juga menawarkan Pulau Sepanjang yang memang bagus, dan menawarkan pulau-pulau kecil lainnya. Tapi pertanyaannya, bisakah pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan kami para investor ketika menanamkan modal di Sumenep.

Pelibatan masyarakat serta upaya untuk mengintegrasikan pariwisata di tengah-tengah masyarakat merupakan sesuatu yang sangat urgen. Oleh karena itu, perlu adanya pembacaan yang objektif terhadap masyarakat yang akan digarap. Maka diperlukan analisa



mendalam dan objektif, sehingga asumsi-asumsi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi riil yang ada. Pendekatan integratif dari kedua belah pihak akan melahirkan pola hubungan yang sinergis dan bisa diarahkan pada pola hubungan yang lebih produktif.

Butuh waktu dan komunikasi yang intens untuk membangun kesepahaman tersebut. Sebagai sebuah entitas, suatu masyarakat memiliki kekhasan tersendiri yang mungkin diwarisi secara turun-menurun. Sebuah entitas tertentu tidak akan sama dengan entitas lainnya. Dan kekhasan tersebut adalah khazanah yang perlu kita bidik sebagai objek pariwisata yang bisa menjadi lumbung pendapatan yang sangat prospektif, karena kekhasan yang berbentuk budaya akan selalu diwariskan secara turun-temurun. Ini berbeda dengan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan. Kekhasan yang kemudian tercermin dalam sebuah budaya akan terus berkembang tanpa mengenal akhir, selama ada kemauan untuk melestarikannya.

Faktor potensial tersebut akan menjadi sumber yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Namun, sebaliknya, ia bisa menimbulkan konflik dan ekstrimitas dari masyarakat yang bersangkutan jika pendekatan yang dilakukan tidak tepat. Mengingat krusialnya aspek tersebut, maka hal yang perlu dilakukan adalah mencoba memahami entitas masyarakat sebagai sebuah subjek yang memiliki kearifan tersendiri. Mereka memiliki pandangan hidup, sistem nilai dan pola pandang tersendiri yang harus dihormati dan disikapi sebagai sebuah khazanah yang harus dikembangkan. Pemahaman itu akan mempermudah pola komunikasi yang akan dilakukan.

Selama ini industri pariwisata tidak memihak kepada siapa-siapa. Oleh karena itu pariwisata hanya aktif di bidangnya dan dikelilingi oleh para usahawan dan instansi di bidang pariwisata.<sup>5</sup> Seolah-olah mereka berbuat hanya untuk kepentingan mereka, tanpa melihat ada sesuatu yang lebih substansial. Padahal program pariwisata merupakan program yang integral. Pariwisata merupakan bagian dari program negara dan tidak bisa dilepaskan dari komunitas tertentu di mana program itu diselenggarakan. Pendekatan seperti itu cenderung mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitar, karena dianggap salah satu bentuk "imperialisme" —"imperialisme" dalam skala kecil.

Penolakan masyarakat terhadap industri pariwisata menjadi marak. Sekalipun tidak menimbulkan konflik fisik, konflik batin sudah cukup membuat para konsumen tidak nyaman. Apalagi bila ada upaya sabotase yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Situasi seperti itu akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang bisa ditarik. Bandingkan dengan Bali, Yogyakarta, dan Sulawesi Tenggara. Masyarakat sudah merasa sebagai bagian yang integral dari program pariwisata tersebut, sehingga tidak ada ketegangan fisik atau psikologis di kalangan mereka. Integralisasi itu sangat penting sebagai sarana untuk menarik partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan produk pariwisata di daerahnya.

---

<sup>5</sup>Tidak Mudah Mewujudkan Visi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Kompas, 23 Februari 2000.

Pemahaman tersebut masih belum menjadi visi bersama penyelenggara pariwisata, baik di kalangan politisi, birokrasi dan swasta profesional. Selama ini yang menjadi pertimbangan rasional adalah keuntungan dan instentif yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kearifan lokal. Untuk menghindari konflik fisik atau penolakan dari masyarakat setempat, cenderung dilakukan secara repfesif oleh elite pemerintahan setempat, bahkan tidak jarang yang menggunakan kekuatan militer. Terbukti upaya tersebut efektif untuk meredam konflik fisik, tetapi tidak konflik psiksologis, yang bisa menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu meletus menjadi konflik fisik ketika terjadi akumulasi kegelisahan di tingkatan komunitas.

Kendala tersebut menarik untuk dilihat di Sumenep. Ada semacam pertentangan kepentingan antara masyarakat dengan penyelenggara pariwisata, termasuk pemerintah dan investor. Di satu sisi, masyarakat menghendaki agar budaya luar yang tidak sejalan dengan sistem keyakinan mereka tidak masuk, tetapi di sisi lain, para investor dan pengusaha pariwisata cenderung memaksakan kehendak untuk menformat bisnis pariwisata sesuai dengan keinginannya. Maka sangat mungkin terjadi ketegangan akibat perbedaan kepentingan, dan itu yang menjadi dasar tidak diterimanya industri pariwisata di Sumenep.

Oleh karena itu, harus dicari sintesa untuk mempertemukan dua kepentingan tersebut. Salah satunya dengan cara melibatkan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal. Industri seperti itu tidak memberi

keuntungan jangka pendek, tetapi merupakan infestasi jangka panjang yang bisa dipelihara secara bersama-sama antara pengelola dengan masyarakat sekaligus, tanpa harus menyinggung dan meminggirkan masyarakatnya. Model pendekatan seperti itu akan membawa industri pariwisata semakin populis dan bermanfaat tidak hanya untuk pengusaha dan negara tetapi juga masyarakat setempat.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat religius yang memegang teguh kepercayaan terhadap agama. Ketersinggungan terhadap budaya asing yang tidak mengindahkan norma agama sangat kuat dan akan mengarahkan mereka pada tindakan anarkis, ekstrem, dan eksklusif. Untuk menghindari penolakan tersebut, maka industri pariwisata harus memperhatikan dan menghindari ketersinggungan atas nama agama. Di sisi lain, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan akar budaya yang sangat kuat. Kekuatan budaya menjadi ciri khas yang tidak bisa dipisahkan. Akar budaya setiap daerah berbeda dengan akar budaya di daerah yang lain. Nilai-nilai religius dan budaya merupakan dua buah nilai yang dipegang teguh sebagai sistem kepercayaan dan sistem nilai yang harus dihormati oleh pihak lain.

Pemahaman seperti itulah yang seharusnya diperhatikan oleh penyelenggara industri pariwisata. Menyinggung agama dan budaya masyarakat setempat sama artinya dengan membangkitkan perlawanan, dan bukan tidak mungkin akan menggagalkan program pariwisata yang telah dirancang sebelumnya.

Kawasan Madura (khususnya Sumenep dan sekitarnya) merupakan daerah yang memiliki penganut agama Islam yang memegang teguh agama. Melihat kondisi seperti itu, maka industri pariwisata belum bisa dikembangkan dengan baik. Kendalanya adalah pandangan masyarakat bahwa pariwisata merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mengandung maksiat. Pariwisata masih cenderung didudukkan secara berlawanan dengan agama. Karena itu, perlu ada upaya-upaya persuasif dari pemegang kebijakan untuk mendudukkan pariwisata secara proporsional, sehingga tidak terkesan bertentangan dengan agama.

Untuk menghindari ketegangan dengan masyarakat, maka pemerintah Sumenep terutama dinas terkait (Dinas Pariwisata) terpaksa tidak lagi menggalakkan industri pariwisata, sehingga pariwisata yang diharapkan menjadi sumber PAD yang sangat potensial, malah tidak termanfaatkan dengan baik.

Memang ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata, tetapi dalam skala yang sangat kecil dan masih jauh dari memadai, misalnya dengan menggalakkan sektor pariwisata religius dan sejarah. Salah satu contoh, Kraton Sumenep dengan segala mitosnya, Asta Tinggi, Masjid Agung Sumenep (yang dinilai memiliki nilai sejarah tinggi), dan beberapa tempat yang lain, yang nuansanya religius.

Jenis pariwisata seperti itu sudah kita promosikan ke mana-mana., termasuk juga pesantren-pesantren yang sebenarnya juga menyimpan potensi untuk menjadi objek wisata, atau paling

tidak sebagai tempat menarik untuk dikunjungi. Sekarang orang Barat melihat pesantren seperti teroris dan itu tampaknya yang diopinikan di negara lain. Pada dasarnya kita sudah mempersiapkan hal-hal tertentu bagi para turis untuk mengunjungi pesantren-pesantren sebagai objek wisata. Tetapi, sejauh ini objek tersebut didatangi hanya untuk keperluan survei dan penelitian. Maka, tidak banyak yang bisa kita harapkan dari sana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Lalu, selain para peneliti, siapakah yang tertarik dengan objek wisata tersebut?

### **Menghindari Eksploitasi**

Pariwisata merupakan bagian dari produk industri. Industri jenis ini memiliki corak dan gaya sendiri yang berbeda dengan jenis industri lain. Industri lain cenderung eksploitatif, setidaknya sampai tingkat tertentu. Tetapi industri pariwisata lebih ditekankan pada pelestarian di berbagai bidang.

Dalam masalah lingkungan, industri pariwisata juga sangat ditekankan pada upaya pelestarian, menjaga keseimbangan ekosistem, dan pelestarian yang lainnya. Tetapi, jenis industri pariwisata tertentu kadang juga melibatkan kegiatan-kegiatan yang eksploitatif, yang mendorong pada pemanfaatan alam untuk kepentingan pariwisata. Tindakan tersebut bisa dibenarkan selama masih tetap menjaga keseimbangan alam. Kegiatan industri pariwisata yang membahayakan keseimbangan alam atau kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan secara tidak langsung akan mematikan potensi industri yang dimiliki, sehingga akan berakibat pada hilangnya potensi yang ada.

Masalah lingkungan, memang tidak begitu menjadi masalah. Akar persoalannya hanya terletak pada penggunaan alat-alat produksi yang menggunakan bahan bakar yang bisa saja menyebarkan polusi dan membuat lingkungan tidak bersih. Di samping itu, limbah-limbah organik dan non-organik sering menjadi masalah tersendiri. Eksploitasi alam dalam bentuk yang lain jarang sekali ditemukan, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, harus ada upaya preventif dan kesatuan pandang untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan dalam menopang industri pariwisata.

Yang akrab di telinga kita adalah eksploitasi sumber daya manusia. Sering terjadi pola hubungan yang eksploitatif antara pengelola pariwisata plus pemilik modal dengan sumber daya manusia yang dimiliki atau warga masyarakat di sekitarnya. Pola hubungan ini juga tidak bisa dibenarkan, mengingat industri pariwisata tidak bisa dilepaskan dari masyarakatnya. Maka, realistis sekali kalau pariwisata berbasis masyarakat diajukan sebagai paradigma dalam membangun industri pariwisata nasional. Dengan paradigma tersebut, eksploitasi terhadap masyarakat bisa dihindari.

Sebagaimana dalam industri-industri yang lain, marginalisasi dan tindakan-tindakan eksploitatif (apalagi eksploitasi terhadap manusia) sama sekali tidak dibenarkan. Eksploitasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus diperangi oleh siapapun.

Eksploitasi dalam bentuk perbudakan mungkin sudah tidak kita temui lagi, tetapi praktik perbudakan

masih banyak kita saksikan, seperti gaji di bawah upah minimum regional untuk buruh, tindakan semena-mena, tidak terpenuhinya hak-hak karyawan seperti hak cuti, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, mempekerjakan anak-anak di bawah umur, tempat kerja yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan pekerja dan sebagainya. Sekalipun itu semua tidak berbentuk perbudakan, tetapi tindakan seperti itu merupakan tindakan sewenang-wenang yang sangat merugikan para karyawan dan buruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup mereka.

Untuk mengatasi praktik seperti itu, pemerintah sudah memberikan aturan yang jelas, tetapi pada praktiknya jarang diimplementasikan di lapangan. Masih banyak tindakan-tindakan yang cenderung mementingkan pengusaha dan pemilik modal tanpa memperdulikan kepentingan dan hak-hak karyawannya.

Dalam industri pariwisata, kenyataan seperti itu banyak ditemukan, mengingat industri jenis ini merupakan rumpun industri yang padat karya, sebuah industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja sebagai penunjangnya, seperti penyediaan pelayanan, perhotelan, pemandu, sampai pada layanan kebersihan. Dan, untuk memenuhi tuntutan pelayanan tersebut dibutuhkan banyak tenaga kerja. Untuk jenis kerja profesional, tindakan eksploitatif sangat jarang kita temukan, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang profesional dan sudah mengerti hak serta kewajibannya. Ini berbeda dengan

tenaga kerja kasar, yang terdiri dari orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka dengan mudah bisa

dieksploitasi demi kepentingan kapital tanpa mempedulikan hak-hak dasar mereka. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*□

